

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah kondisi individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan maupun kesehatan, kemiskinan dapat terjadi karena kurangnya akses dalam mendapatkan pendidikan serta pekerjaan. Kemiskinan menjadi persoalan yang menjadi fokus pemerintah di berbagai negara. Menurut Todaro dan Smith (2006, hlm. 231) dan Kuncoro (2003, hlm. 101) Negara miskin dihadapkan antara jumlah pertumbuhan dan distribusi penghasilan yang tidak rata, kebanyakan negara berkembang yang dihadapi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi tetapi, kurang dapat memberikan kemudahan bagi para masyarakat miskin.

Indonesia merupakan negara keempat yang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 total penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan menyentuh 269,6 juta jiwa. Provinsi di Pulau Jawa menguasai kurang lebih 46% total jiwa yang ada di Indonesia. Provinsi tersebut diantaranya ada Jawa Barat (49,57 juta), kemudian Jawa Timur (39,96 juta), dan Jawa Tengah (34,74 juta). Indonesia termasuk negara yang menghadapi permasalahan kemiskinan, pemerintah dituntut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia namun sampai saat ini pemerintah belum mampu membereskan masalah kemiskinan. Awal memburuknya kondisi kemiskinan yaitu saat tahun 1998 pengaruh dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, menjadikan total masyarakat miskin di Indonesia menjadi semakin naik yang sebelumnya telah berkurang, jika dilihat secara persentase masyarakat miskin bertambah yang awalnya 22,5 juta jiwa atau 11,34% saat tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa atau 20,30% saat tahun 1998. ketika krisis melanda kenaikan jumlah masyarakat miskin (banyak masyarakat yang menjadi miskin secara tiba-tiba) dengan total 27 juta jiwa atau 120% merupakan jumlah yang tidak kecil. Jumlah masyarakat miskin jika dilihat secara absolut hampir menyentuh jumlah masyarakat miskin ketika tahun 1976 dengan total 54,2 juta jiwa, meskipun krisis tersebut telah berlalu, akan tetapi saat tahun

2003 jumlahnya terus meningkat, yaitu sebanyak 37,3 juta jiwa atau 17,42% dari total masyarakat Indonesia (Mahri, 2006).

Pemerintah Indonesia telah merencanakan upaya untuk dapat penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah masyarakat miskin di Indonesia belum mengalami penurunan secara signifikan, walaupun menurut data di BPS (Badan Pusat Statistik) telah menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin, secara kualitatif belum dapat menunjukkan pengaruh yang nyata tetapi melihat keadaan penduduk miskin yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun (Wongdesmiwati, 2009). Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002, hlm. 2), keberhasilan program dalam menanggulangi masalah kemiskinan tergantung pada identifikasi penduduk serta lokasi yang difokuskan contohnya siapa yang mengalami kemiskinan dan di mana tempat tinggalnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Todaro (2006, hlm. 269) menyatakan bahwa ketika akan merencanakan program serta kebijakan yang akan digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yang efektif maka dibutuhkan kemampuan yang lengkap mengenai sasaran program penanggulangan kemiskinan serta pengetahuan tentang perekonomian masyarakat miskin.

Melalui identifikasi masalah yang dilakukan oleh berbagai pihak pemerintah, didapatkan berbagai cara atau upaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, salah satunya yaitu dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri, karena melihat dari pemaparan diatas faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi miskin ialah kurangnya akses atau tidak mampunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu banyak program dari pemerintah yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Tujuan pemerintah melibatkan masyarakat tidak lain untuk menjadikan masyarakat berdaya dengan membuat masyarakat menjadi produktif dan kreatif untuk dapat melihat peluang baik itu dengan memanfaatkan potensi di lingkungan maupun kemampuannya yang ada di dalam dirinya sendiri. Dengan begitu masyarakat tidak terus menerus bergantung pada program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Sodik A. Kuntoro (2006, hlm. 15) Pendidikan masyarakat mempunyai bentuk orientasi serta fungsi yang jauh lebih umum. Bentuk

pendidikan yang dilakukan di masyarakat adalah beragam tidak hanya pendidikan nonformal yang dilakukan dengan sistematis, menggunakan tujuan serta kurikulum yang telah terstruktur. Di masyarakat banyak ditemui bentuk pendidikan yang tidak disusun secara sistematis, dan terjadi secara alami bersatu dengan aktivitas kehidupan salah satunya kegiatan kehidupan seperti dalam bekerja, perayaan kebudayaan, aktivitas olahraga dan keagamaan itu semuanya memberikan makna pendidikan. Adapun menurut Ihat Hatimah (2016, hlm. 8) pendidikan berbasis masyarakat mengandung makna bahwa pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian merupakan otoritas masyarakat sepenuhnya, dalam upaya menuju masyarakat berdaya menggunakan berbagai sumber kemampuan di masyarakat. Pendidikan masyarakat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal yang merupakan kebutuhan dasar atau sebagai cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pendidikan masyarakat memiliki beberapa bidang fokus satu diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan dengan tujuan menjadikan masyarakat berkembang, mandiri, berdaya dengan memiliki kekuatan untuk melawan penekan dalam seluruh bidang serta aspek masyarakat (Sutoro Eko. 2002). Konsep pemberdayaan dapat dibagi menjadi dua pemahaman, *pertama*, pemberdayaan dapat diartikan dengan memposisikan masyarakat untuk bergantung hanya dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah melainkan sebagai subjek atau partisipan yang ikut andil dalam proses pemberdayaan atau dapat dikatakan mandiri. Berbuat mandiri bukan menjadikan masyarakat melakukan segala sesuatu sendiri, memberikan umum (perumahan, pendidikan, kesehatan serta transportasi) untuk masyarakat masih tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dikatakan mandiri dalam menjadi partisipan terlihat pada kemampuan untuk mengembangkan potensi baik dalam dirinya sendiri bahkan lingkungan sekitar, mengontrol lingkungan dan sumberdaya, menyelesaikan masalah dan aktif dalam kegiatan politik, masyarakat mampu ikut serta di dalam pembangunan serta pemerintahan (Sutoro Eko. 2002).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan dengan masyarakat yang awalnya tidak berdaya atau tidak mampu menjadi

berdaya dan mampu dengan tujuan menjadikan masyarakat mampu dalam mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam pemberdayaan akan melalui suatu proses, proses tersebut memiliki pengertian sebagai tahap-tahap yang akan dilakukan secara sistematis untuk merubah masyarakat yang belum bahkan tidak berdaya menjadi berdaya (Sulistiyani, 2004 hlm. 77). Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Pemerintah banyak mengeluarkan program-program untuk memberdayakan masyarakat, salah satunya adalah program Raksa Desa. keberhasilan suatu program pemberdayaan dapat terlihat dari tanggapan atau sikap yang berikan oleh masyarakat penerima bantuan jika masyarakat merasa program tersebut memberikan pengaruh atau perubahan yang baik kepada mereka maka masyarakat akan mengikuti semua arahan yang diberikan atau setidaknya mendengarkan dengan begitu program pemberdayaan tersebut dapat dikatakan berhasil.

Program Raksa merupakan program yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintah yang baik dan sinergi pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Adapun misi Kabupaten Bandung yaitu; (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (2) menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing (3) mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup (5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pelaksanaan program Raksa Desa, perangkat desa melakukan pengarahan kepada masyarakat desa untuk memberitahukan langkah-langkah pelaksanaan program raksa desa.. Sesuai dengan pengertian pendidikan masyarakat yang menuntut masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, maka kegiatan pengarahan ini penting untuk

memberitahukan peran serta kewajiban dari masing-masing orang. Karena tujuan dari program raksa desa tidak hanya untuk memberikan bantuan secara materiil namun juga untuk memberdayakan masyarakat desa untuk dapat saling membantu dan membuat masyarakat menjadi mandiri.

Raksa Desa adalah singkatan dari lima aspek yaitu rumah, air, kakus, sampah dan alam adapun arti dari kata Raksa yaitu ngarumat atau memelihara, sama seperti namanya program ini bertujuan untuk memelihara lingkungan dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kabupaten, kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima fokus diantaranya; *pertama* ada rumah, maksud dari rumah ini adalah mengentaskan permasalahan rutilahu atau rumah tidak layak huni yang masih ditempati oleh sebagian masyarakat miskin, *kedua* ada air, salah satu contohnya yaitu tidak adanya saluran pembuangan air limbah, *ketiga* ada kakus, karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kakus di dalam rumahnya, *keempat* ada sampah, masih kurangnya tempat pembuangan sampah di setiap lingkungan tempat tinggal masyarakat, *kelima* ada alam sekitar tempat tinggal masyarakat.

Desa Cinunuk termasuk Desa di Kabupaten Bandung yang menerima program Raksa Desa ini. Program yang telah dilakukan mulai dari tahun 2015 ini terus dilaksanakan sampai saat ini. Banyaknya Rutilahu di Desa Cinunuk menjadikan desa lebih fokus pada pembangunan Rutilahu. Awal pelaksanaan program ini dilakukan dengan diadakannya musyawarah dusun mengenai calon penerima bantuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dari setiap RW untuk mengirimkan lima kandidat yang dirasa perlu mendapatkan bantuan dengan jenis permasalahannya, kemudian perangkat desa melakukan analisis prioritas untuk menentukan siapa yang dirasa paling membutuhkan program bantuan ini. Karena program Raksa Desa hanya memberi anggaran pada lima orang setiap tahunnya.

Dalam pengelolaannya Pemerintah kabupaten telah mengeluarkan PERBUP Bandung No. 3 tahun 2019 mengenai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan program Raksa Desa di Kabupaten Bandung tahun anggaran 2019. Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai program Raksa Desa dengan memfokuskan pada bagaimana Raksa Desa sebagai program

pemberdayaan dapat menanggulangi kemiskinan, karena seperti yang telah dijelaskan diatas, cara untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri atau dengan cara melibatkan masyarakat untuk ikut dalam proses pelaksanaan program guna meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Upaya menanggulangi kemiskinan melalui Raksa Desa sebagai program pemberdayaan masyarakat”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten telah mengeluarkan peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019
2. Menurut Badan Pusat Statistik (dapat diakses di [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) pada maret 2019 masyarakat Desa memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi yaitu sebesar 15,15 juta jiwa dibandingkan dengan perkotaan sebesar 9,99 juta jiwa di Indonesia
3. Masih banyaknya masyarakat miskin yang perlu bantuan untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri
4. Menurut Badan Pusat Statistik (dapat diakses di [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) pada maret 2019 jumlah penduduk miskin di Jawa khususnya di desa mencapai 12,25% sedangkan di perkotaan hanya 6,46%
5. Faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin adalah kurangnya akses dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan
6. Berdasarkan temuan dilapangan, Rutilahu di Desa Cinunuk hanya berlapis bilik yang bahkan sudah tidak layak, bahkan keluarga yang tinggal di Rutilahu tersebut tidak dapat tidur dengan nyenyak karena sewaktu waktu rumah tersebut dapat rubuh
7. Berdasarkan temuan dilapangan, rutilahu memiliki permasalahan di bagian atap rumah menjadikan rumah selalu bocor ketika hujan
8. Berdasarkan temuan dilapangan, pemilik Rutilahu merupakan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

- a. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan program Raksa Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Cinunuk?
- b. Bagaimana hasil pelaksanaan program Raksa Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Cinunuk?
- c. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Raksa Desa melalui analisis SWOT?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan program Raksa Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Cinunuk
- b. Untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan program Raksa Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Cinunuk
- c. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Raksa Desa melalui analisis SWOT

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta manfaat. untuk uraiannya terdapat manfaat secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

manfaat teoritis yaitu dapat dimanfaatkan untuk menambah khazanah keilmuan, atau sebagai sumber rujukan dalam pengetahuan mengenai raksa desa sebagai program pemberdayaan masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lainnya.

#### **1.5.2 Manfaat praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan cara untuk menambah wawasan pribadi dan untuk dijadikan bahan rujukan dalam penelitian lainnya
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan menjadi ikut andil dalam program pemerintah desa.
- c. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran dalam menyelenggarakan program dan dalam mengembangkan program desa.

## **1.6 Struktur Organisasi Skripsi**

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2018. Uraian yang akan disajikan pada setiap bab adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORITIS**, Pada bab ini terdapat kajian pustaka, yaitu uraian mengenai teori-teori relevan yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**, Pada bab ini menerangkan metode-metode dalam penelitian diantaranya yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, partisipan penelitian, instrumen penelitian, teknik dalam mengumpulkan data dan analisis data

**BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini menguraikan pemaparan data serta pembahasan data hasil penelitian

**BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI dan REKOMENDASI**, Pada bab ini mengumpulkan hasil pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah serta penyampaian saran